

# PENDAMPINGAN DALAM PROGRAM INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) MELALUI BADAN KERJASAMA ANTARA DESA (BKAD) KONAWE DI MASA PANDEMI COVID-19

M. Fauzhan Algiffari<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Corresponding author : M. Fauzhan Algiffari

E-mail : fauzan.algiffari@gmail.com

Diterima 24 Desember 2022, Direvisi 31 Januari 2023, Disetujui 01 Februari 2023

## ABSTRAK

Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan perekonomian. Di tengah perlambatan ekonomi global yang mengkhawatirkan, diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas tentang akselerasi implementasi program infrastruktur tanggal 10 Desember 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diamanahkan untuk memperbanyak kegiatan padat karya agar menjadi daya ungkit ekonomi nasional. Dalam perjalanannya Program Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi dengan menggunakan metode swakelola yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD), sehingga dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang dituju dalam peningkatan ekonomi ini dikhususkan kepada masyarakat yang tinggal di kecamatan konawe, kabupaten konawe, provinsi Sulawesi tenggara. Swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh masyarakat oleh sebab itu sangat dibutuhkan pendampingan yang kompeten dalam menentukan infrastruktur yang akan dibangun, pendamping harus dari Teknik. Sehubungan dengan perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dalam pendampingan dan pelaksanaannya harus mematuhi protokol Kesehatan.

**Kata kunci:** pendampingan; PISEW; BKAD; covid-19

## ABSTRACT

Poverty alleviation is still a challenge for the government because it is a problem that must be resolved immediately in order to improve the economy. In the midst of an alarming global economic slowdown, government intervention is needed to increase access to basic settlement infrastructure that can create jobs for the community. In accordance with the directives of the President of the Republic of Indonesia at a closed meeting on accelerating the implementation of the infrastructure program on 10 December 2019, the Ministry of Public Works and Public Housing has been entrusted with increasing labor-intensive activities so that they can leverage the national economy. In its journey the Regional Economic Infrastructure Program (PISEW) is one of the government programs that aims to improve the community's economy during a pandemic by using the self-management method which will be managed by community groups of the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD), so that the impact and benefits can be felt directly by the local community. The target community in this economic improvement is specifically for people who live in the Konawe sub-district, Konawe district, Southeast Sulawesi province. In-house management is an activity that is managed directly by the community, therefore competent assistance is needed in determining the infrastructure to be built, the assistant must be from Engineering. In connection with the development of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, the assistance and implementation must comply with health protocols.

**Keywords:** assistance, PISEW; BKAD; covid-19

---

## PENDAHULUAN

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran, telah

dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya) sejak tahun 1970-an telah melakukan program

pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Hal ini diawali dengan program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu rumah/perumahan serta prasarana dan sarana di kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan P3D telah dikembangkan pendekatan Tribina (bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha), dan mulai dilaksanakannya metode “melatih sambil mengerjakan” yang saat ini dikenal dengan “pemberdayaan masyarakat”.

Dari pendekatan P3D yang bersifat sektoral, berkembang dengan pendekatan holistik dan berdimensi kawasan menjadi program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu (P2LDT). Tahun 1980-an P2LDT dilanjutkan dengan pendekatan Pembangunan Permukiman Desa Pusat Pertumbuhan (P2DPP), yang kemudian berkembang lagi menjadi program Kawasan Terpilih Pembangunan Pusat Desa (KTP2D) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan berdasarkan potensi unggulan di wilayah setempat.

Pada tahun 2002 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan mulai dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. Strategi yang digunakan adalah mendorong dan mendukung pembangunan kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan. Seiring dengan pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Konsep ini juga dilaksanakan untuk Program Pengembangan Kawasan Minapolitan yang berfokus pada potensi perikanan. Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi, program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dilaksanakan bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010.

Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja melalui program pemberdayaan masyarakat, yakni “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Program ini dilaksanakan melalui beberapa program yang dikelola oleh beberapa kementerian dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri dikoordinasi oleh Kemenko-Kesra saat itu, dimana seluruh kecamatan di Indonesia mendapat

dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam kegiatan PNPM-Mandiri, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program, yaitu:

- a) PNPM-Mandiri Perkotaan;
- b) PNPM-Mandiri Rural Infrastructure Support (RIS);
- c) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP); serta PNPM-Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), dilaksanakan bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Cipta Karya bertindak sebagai lembaga pelaksana (executing agency) dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Kementerian Dalam Negeri membantu dalam bidang sosialisasi, diseminasi, publikasi, kampanye program, dan pelatihan (penguatan kelembagaan). Selain bekerja sama dengan dua lembaga tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan kementerian terkait (pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan, serta kesehatan).

Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan permukiman pada kawasan perdesaan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman dalam skala perdesaan (supra desa), serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dengan target nasional seluas 78.384 ha. Pengembangan ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019, sekaligus tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia:

- Ke-3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.
- Ke-6 : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Ke-7 : mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Beberapa sasaran Nawacita pun tertuang dalam rencana pembangunan berbagai infrastruktur, seperti transportasi, sanitasi, kesehatan, peningkatan dan pemasaran hasil produksi. Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, maka Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) ini disusun

sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Infrastruktur yang dibangun dapat berupa jalan (1), jembatan (2), drainase irigasi (3), bangunan sederhana (4) dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan agar dimasa pandemi ini perekonomian dan sosial infrastruktur dapat dirasakan juga oleh masyarakat yang terkena pandemic covid-19 dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di wilayah setempat. Tata cara pencegahan penyebaran covid -19 dalam pelaksanaan kegiatan padat karya dapat melalui juga 3 M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (5). Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) digunakan dalam rangka penyediaan atau peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan perdesaan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah perdesaan. Hasil-hasil kegiatan konstruksi nantinya akan diserahkan oleh Satker PKP provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pemerintah Daerah/Desa untuk dilakukan pemanfaatan dan pemeliharaan secara swadaya dan berkelanjutan (KPUPR, 2020).

## METODE

Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat dalam kajian ini ialah PAR (Participatory Action Research). Menurut (Setyaningsih & Asnawi, 2021) metode PAR lebih efektif karena lebih fokus kepada pelaku UMKM sehingga bisa lebih optimal dalam penyelesaian masalah yang ada dan mendukung peran aktif dari pelaku UMKM. Tim Pengabdian secara langsung melakukan analisis situasi mitra, menggali permasalahan dari mitra, berdiskusi dan menawarkan alternatif solusi yang diinisiasi oleh mitra, dan pada akhirnya solusi tersebut bermanfaat untuk mitra (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat dilaksanakan antara dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan BKAD Kecamatan Konawe. Strategi pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- 1) Pertemuan Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan program kepada masyarakat Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara.
- 2) Survey Kawasan. Bertujuan untuk melihat potensi-potensi dari Kawasan yang akan dibangun infrastruktur.
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan ini digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan RAB dan DED infratraktur pembantu ekonomi yang akan

dibangun di Kawasan tersebut.

- 4) Rapat Prapelaksana. Kegiatan ini akan menjelaskan kerangka acuan kerja yang akan digunakan dalam pembangunan infrastuktur yang akan dilaksanakan. Dalam panduan teknis pelaksanaan kegiatan telah tertuang dalam pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman PUPR (KPUPR, 2019). Pemantauan dan pengawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau jalannya infrastruktur yang dibangun agar sesuai dengan bestek yang telah dibuat dan disepakati pada saat rapat pra pelaksana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di lokasi Pusat Kawasan Desa Sanggona, Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe; lokasi Penyangga Kawasan Desa Asoniwowo Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe; dan di lokasi Penyangga Kawasan Desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe . Adapun tujuan kegiatan yaitu untuk menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Adapun yang menjadi sasaran kegiatan program PISEW ini yaitu terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan, yang dapat berupa:

- a) infrastruktur transportasi;
- b) infrastruktur air minum dan sanitasi;
- c) infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri; dan infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata.
- d) meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- e) mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

Adapun penerima manfaat dari program PISEW ini sebagai berikut :

- 1) Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;
- 2) Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- 3) Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun; dan Pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait.

Keberhasilan kegiatan PISEW dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja, seperti disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Indikator Kinerja Keberhasilan Kegiatan PISEW

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator	Keterangan
1.	Indikator Dampak (outcome)	Mendukung upaya penurunan biaya produksi	Meningkatnya akses masyarakat di kawasan potensial perdesaan pada layanan infrastruktur permukiman yang mendukung pengembangan sosial ekonomi
		Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan potensial	Adanya upaya harmonisasi rencana pembangunan kawasan dengan rencana pembangunan kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
	Indikator Kinerja (output)	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan kawasannya	<p>a. Adanya kelembagaan masyarakat tingkat Kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat yang mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan.</p> <p>b. Terselenggaranya musyawarah warga dalam Forum Kecamatan sebagai wujud demokrasi proses perencanaan</p> <p>c. Terintegrasinya rencana pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan yang disusun bersama masyarakat</p>

		dengan rencana pembangunan daerah.
	Meningkatnya layanan infrastruktur kawasan potensial perdesaan	<p>a. Terlaksananya Pembangunan infrastruktur wilayah secara tepat sasaran</p> <p>b. Terbangunnya infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang memenuhi standar kualitas serta bermanfaat</p>
	Meningkatnya kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi	<p>a. Mobilisasi KTP PISEW, Tenaga Ahli Provinsi, Asisten Tenaga Ahli Provinsi dan FM sesuai jadwal nasional</p> <p>b. Terselenggaranya penguatan kapasitas Fasilitator melalui pelatihan maupun OJT</p> <p>c. Terlaksananya proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang memenuhi aspek teknis dan kriteria yang telah ditentukan</p> <p>d. Terjadinya penguatan dan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi</p> <p>e. Terselenggaranya mekanisme penanganan pengaduan yang efektif</p>

**2. Profil Kecamatan Secara Umum Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Konawe**

Secara astronomis, Kecamatan Konawe terletak antara 3°51'15"-3°57'30" Lintang Selatan, serta antara 122°03'45" – 122°07'30" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Konawe memiliki batas-batas yaitu: di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Unaaha dan Kecamatan

Wawotobi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lambuya, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wonggeduku, serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Uepai (BPS, 2019).

### Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Konawe 4.004 Ha atau 6,91 persen dari luas daratan Kabupaten Konawe. Desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Konawe adalah Desa Uete dengan luas 800 Ha atau 20 persen dari luas Kecamatan Konawe. Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Mokowu dan Wonuambae dengan luas 150 Ha atau 4 persen dari luas Kecamatan Konawe.

### Penetapan Kawasan PISEW terpilih (Peta dan Deliniasi)

Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan serta memperhatikan maksud dan tujuan pelaksana Program PISEW, maka telah ditetapkan Kawasan sasaran PISEW tahun 2020 terdiri dari desa pusat kawasan dan desa penyangga kawasan. Desa-desa yang menjadi desa pusat kawasan dan penyangga kawasanyaitu :

- Desa Sanggona sebagai Desa Pusat Kawasan.
- Desa Asoniwowo sebagai desa penyangga kawasan.
- Desa Mokowu sebagai desa penyangga kawasan.
- Desa Sanggona sebagai Pusat Kawasan

### Letak Geografis Desa Sanggona

Desa Sanggona terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang mana dalam urusan pemerintahan Kepala Desa dibantu dengan masing-masing Kepala Dusunnya.

Desa Sanggona mempunyai luas wilayah 205 Ha. Luas Lahan Pertanian + 70 Ha. Luas Permukiman + 57 Ha. Iklim Desa Sanggona sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan perkembangan yang menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Sanggona.

Berdasarkan data statistic Desa Sanggona jumlah penduduk desa sebanyak 780 Jiwa. Dari 3 Dusun dengan demikian Desa Sanggona masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mengembangkan potensinya (Kantor Desa Sanggona, 2020).

### Aksesibilitas Menuju Desa

Jarak Desa Sanggona dari ibu Kota Kecamatan Konawe yang sekaligus menjadi

Ibu Kota Kabupaten Konawe +7 Km yang dapat ditempuh dengan jalan darat kendaraan darat roda dua dan roda empat..

### Data Kependudukan

Sebagian besar penduduk Desa Sanggona bermata pencaharian sebagai petani. Selebihnya bermata pencaharian dari sektor lain secara berturut-turut, sektor perdagangan dan sektor jasa, dan yang berstatus sebagai PNS dan pegawai swasta sebanyak 24 KK.

### Letak Geografis Desa

Desa Asoniwowo sebagai Kawasan Penyangga. Desa Asoniwowo terdiri dari 3 (tiga) yang mana dalam urusan pemerintahan Kepala Desa dibantu dengan masing-masing Kepala Dusun. Desa Asoniwowo mempunyai luas wilayah 194 Ha. Luas ruang terbuka hijau 58 Ha, luas lahan pertanian + 96 Ha dan luas permukiman + 78 Ha. iklim Desa Asoniwowo sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan perkembangan yang menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Asoniwowo (Kantor Desa Asoniwowo, 2020).

### Aksesibilitas Menuju Desa

Jarak Desa Asoniwowo dari ibu Kota Kecamatan Konawe yang sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Konawe+ 8 Km yang dapat ditempuh dengan jalan darat kendaraan darat roda dua dan roda empat.

### Data Kependudukan

Berdasarkan data statistik Kecamatan Konawe Dalam Angka jumlah penduduk Desa Asoniwowo sebanyak 649 jiwa, yang terdiri dari pria dewasa 240 jiwa, perempuan dewasa 317 jiwa, anak-anak 92 jiwa, jumlah KK 233 KK dan jumlah warga miskin 46 jiwa.

### Letak Geografis Desa Desa Mokowu

Desa Mokowu sebagai Penyangga Kawasan. Desa Mokowu terdiri dari 3 (tiga) yang mana dalam urusan pemerintahan Kepala Desa dibantu dengan masing-masing Kepala Dusun. Desa Mokowu mempunyai luas wilayah 14,5 Ha. Luas Lahan Pertanian +5 Ha. Luas Permukiman +8 Ha. Luas Ruang terbuka hijau +2 Ha. Iklim Desa Mokowu sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan perkembangan yang menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Mokowu (Kantor Desa Mokowu, 2020).

**Aksesibilitas Menuju Desa**

Jarak Desa Mokowu dari ibu Kota Kecamatan Konawe yang sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Konawe +9 Km yang dapat ditempuh dengan jalan darat kendaraan darat roda dua dan roda empat.

**Data Kependudukan**

Berdasarkan data statistik Kecamatan Konawe Dalam Angka jumlah penduduk Desa Mokowu sebanyak 630 jiwa, yang terdiri dari 260 pria dewasa, 240 perempuan dewasa, dan 130 anak-anak. Dari 3 Dusun yang ada terdapat 212 KK.

**Rencana Jadwal Kegiatan Pendampingan**

Jadwal seluruh kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi di tingkat kawasan dapat dilihat pada Gambar 1-7.

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal			Mei				Juni			
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>A TAHAPAN PERSIAPAN</b>												
1	Identifikasi Kelembagaan BKAD	4	13/5/2020	16/5/2020								
2	Pembuatan Surat kesanggupan Memanfaatkan dan memelihara Infrastruktur terbangun	4	13/5/2020	16/5/2020								
3	Pencatatan Kelembagaan	2	13/5/2020	16/5/2020								
<b>B TAHAPAN PERENCANAAN</b>												
1	Pertemuan Kecamatan 1	4	18/5/2020	20/5/2020								
2	Survei identifikasi kawasan	4	19/5/2020	21/5/2020								
3	Survei rencana infrastruktur	4	19/5/2020	21/5/2020								
4	Penyusunan dokumen profil kawasan	7	19/5/2020	21/5/2020								
5	Penyusunan DED dan RAB	11	22/5/2020	2/6/2020								

**Gambar 1. Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe Bulan ke 1 (4 Mei– 2 Juni 2020)**

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal			Juni				Juli			
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>B TAHAPAN PERENCANAAN</b>												
6	Verifikasi Perencanaan DED dan RAB TK. Provinsi	13	03/06/2020	15/6/2020								
7	Penyusunan Nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara PA/KPA/BKAD	5	16/06/2020	20/6/2020								
8	Penyusunan Rencana perjanjian Kerjasama (PKS) Kontrak Swakelola	5	16/06/2020	20/6/2020								
9	Dukungan BinteK Perencanaan DED dan RAB TK Pusat	5	20/06/2020	25/6/2020								
10	Finalisasi DED dan RAB	7	25/06/2020	2/7/2020								

**Gambar 2. Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe Bulan Ke 2 (3 Juni-2 Juli 2020).**

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal			Juli				Agustus			
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>C PELAKSANAAN</b>												
1	Rapat PRA Pelaksanaan Konstruksi	5	3/7/2020	5/7/2020								
2	Penanda tanganan PKS antara PPK dengan BKAD	1	5/7/2020	5/7/2020								
3	OUT Pelaksanaan konstruksi	LS	Berkala	Berkala								
4	Pencairan KPPN Tahap pertama 70%	7	06/7/2020	07/7/2020								
5	Penyaluran termin 40% ke BKAD	3	07/7/2020	10/7/2020								
7	Pelaksanaan Infrastruktur	120	07/7/2020	07/8/2020								

**Gambar 3. Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe Bulan Ke 3 (3 Juli – 1 Agustus 2020)**

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal			Agustus				September			
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>C PELAKSANAAN</b>												
1	Penyaluran termin 30% ke BKAD	17	08/8/2020	11/8/2020								
2	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	22	9/8/2020	31/8/2020								

**Gambar 4. Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe bulan ke 4 (2 Agustus –31 Agustus 2020).**

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal			September				Oktober			
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>C PELAKSANAAN</b>												
1	Pencairan KPPN Tahp Ke 2 30%	7	1/9/2020	7/9/2020								
2	Penyaluran termin 30% ke BKAD	3	08/9/2020	10/9/2020								
3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	90	11/9/2020	30/9/2020								

**Gambar 5. Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe bulan ke 5 (1 September– 30 september 2020).**

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal			Oktober				November			
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>C PELAKSANAAN</b>												
1	Pertemuan Kecamatan 2	7	1/10/2020	3/10/2020								
2	Pemeriksaan hasil Akhir	3	4/10/2020	29/10/2020								

**Gambar 6. Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe bulan ke 6 (1 Oktober – 30 Oktober 2020)**

NO	Rincian Kegiatan	Rencana Jadwal		Oktober				Nvember				
		H	mulai	selesai	1	2	3	4	1	2	3	4
C	PELAKSANAAN											
1	Serah terima Pekerjaan BKAD ke PPK	7	31/10/2020	6/11/2020								
2	Serah terima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ke Pemerintah Desa	3	7/11/2020	10/11/2020								
3	Evaluasi dan Pemeliharaan	19	11/11/2020	29/11/2020								

**Gambar 7.** Jadwal Pelaksanaan PISEW Kecamatan Konawe bulan ke 7 (31 Oktober – 29 November 2020)

### PERTEMUAN KECAMATAN I

Adapun kegiatan pertemuan di kecamatan I meliputi :

- a. Sosialisasi dan pengenalan kegiatan PISEW kepada Masyarakat,
- b. Penggalian potensi kawasan di kecamatan dan desa sasaran,
- c. Penggalian rencana infrastruktur yang :
  - 1) Sesuai dengan Indikator Kinerja Keberhasilan PISEW,
  - 2) Didukung oleh potensi sumber daya yang ada di kawasan tersebut,
  - 3) Menjadi jalan keluar terhadap permasalahan/hambatan yang dihadapi masyarakat dalam hal sosial ekonomi wilayah/kawasan
- d. Mendapatkan BKAD yang disepakati masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.



**Gambar 8.** Kegiatan pertemuan kecamatan I

### SURVEI KAWASAN SASARAN

Kegiatan survei Kawasan sasaran dilakukan dengan beberapa agenda berikut :

- a. Memetakan potensi dan permasalahan ekonomi serta infrastruktur
- b. Mengetahui sinergitas kegiatan dan program desa, kecamatan dan kabupaten.

c. Mendapatkan gambaran tentang:

- kebutuhan infrastruktur
- permasalahan dan kendala dalam perencanaan
- kondisi lokasi kegiatan



**Gambar 9.** Kegiatan survei Kawasan sasaran

### PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

a. Pekerjaan Persiapan

- Untuk mendapatkan data real lapangan
- Agar lebih memahami permasalahan dan kendala dalam perencanaan di lokasi kegiatan.

b. Penyusunan Rancangan Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED)

- Agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan bisa terukur, terkontrol serta bisa dipertanggungjawabkan secara teknis
- Untuk mempermudah pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur terjaga dengan baik
- Sebagai dasar dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)



**Gambar 9.** Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan

### RAPAT PRA PELAKSANAAN

- Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik di lapangan.
- Sebagai forum diskusi pembahasan titik kritis dalam pelaksanaan.
- Sebagai forum membahas strategi dan tata cara pelaksanaan konstruksi



Gambar 10. Kegiatan rapat pra pelaksanaa

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Sebagai kontrol terhadap:

- kualitas dan kuantitas pekerjaan;
- efektifitas penggunaan alat, bahan, material serta tenaga kerja;
- penggunaan dana (akuntabilitas);
- waktu pelaksanaan.



Gambar 11. Kegiatan pemantauan, pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi



## SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari pendampingan ini yaitu 1) masyarakat bersama-sama membangun desanya bertujuan meningkatkan perekonomian setempat melalui program pemerintah; 2) pendampingan dalam kegiatan ini harus didampingi dengan pendamping yang menguasai konsep dan infrastruktur sosial ekonomi yang akan dibangun; 3) BKAD dan masyarakat sekitar bersedia menjaga dan memelihara infrastruktur yang dibangun untuk mereka sendiri agar perekonomian di tempat ini dapat meningkat, apalagi dimusim pandemic covid-19.

## DAFTAR RUJUKAN

- BPS. (2019). *Kecamatan Konawe Dalam Angka, BPS Kabupaten Konawe*.
- Kantor Desa Sanggona, 2020.
- Kantor Desa Asoniwowo, 2020.
- Kantor Kepala Desa Mokowo. 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (KPUPR). (2019). *Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Pisew*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (PUPR). (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Konstruksi Pisew*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (KPUPR). (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (KPUPR). (2020). *Surat Edaran Nomor: /Se/Dc/2020 Tentang Tata Cara Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (KPUPR). (2020). *Buku Saku Petunjuk Konstruksi Jalan*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (KPUPR). (2020). *Buku Saku Petunjuk Konstruksi Infrastruktur Drainase & Irigasi*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, (KPUPR). (2020). *Buku Saku Petunjuk Konstruksi Bangunan Sederhana*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

(KPUPR). (2020). *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pisew*. Jakarta.

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 1(6), 62–71.

Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 124–143. .